

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., Hogan, C. E. (2020). *Auditing and Assurance Services (edisi ke-17)*. United Kingdom: Pearson.
- Gasperz, J., Sososutiksno, C., Limba, F.B., Gainau, P. C., Sapulette, A. G., & Latuamury, J. (2022). Reviu Laporan Keuangan Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Kota Ambon. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 2, 1793-1798.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Prasetyo, A. & Pangemanan S.S. (2014). Analisis Dampak Reviu Inspektorat terhadap Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Minahasa Tenggara TA 2010 dan 2011. *Jurnal Accountability*, 3, 1-13.

Republik Indonesia. (2022). *Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ristiyanto, N. (2013). *Menyimak Persamaan dan Perbedaan antara Audit Eksternal dan Internal Pemerintah*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.